

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014

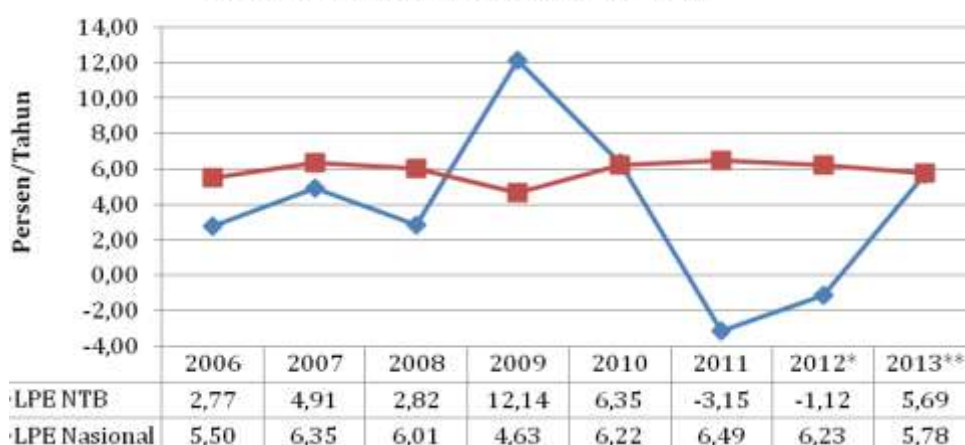
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan, lahan sawah, perkebunan daerah, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah ini. Kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2006-2013 tergolong rendah, yang ditunjukkan dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 3,80 persen. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 1). Kontribusi PDRB Provinsi NTB terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah sebesar 58,42 persen, dan menyumbang sebesar 0,74 persen pada pembentukan PDB nasional.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

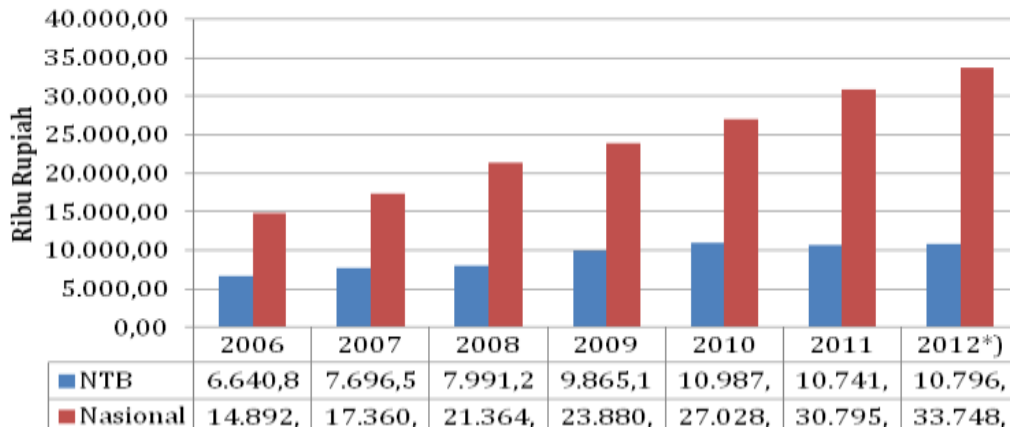


Sumber: BPS, 2013

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat mengakibatkan kesenjangan pendapatan perkapita dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Provinsi NTB dan PDB nasional sebesar 44,59 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 31,99 persen (Gambar 2). Tantangan

yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

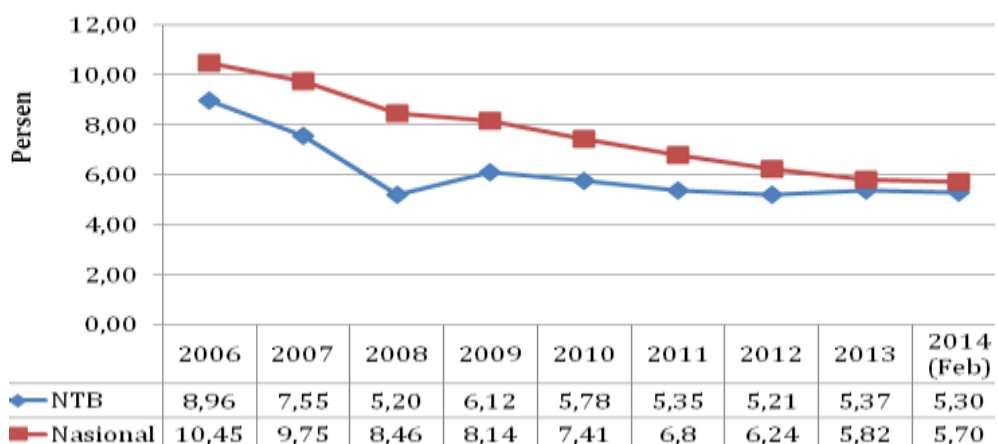


Sumber: BPS, 2013

2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Barat selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,59 persen. Meskipun laju pertumbuhan ekonominya rendah, tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun (Gambar 3). Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Nusa Tenggara Barat termasuk rendah karena berada di bawah rata-rata TPT nasional. Rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

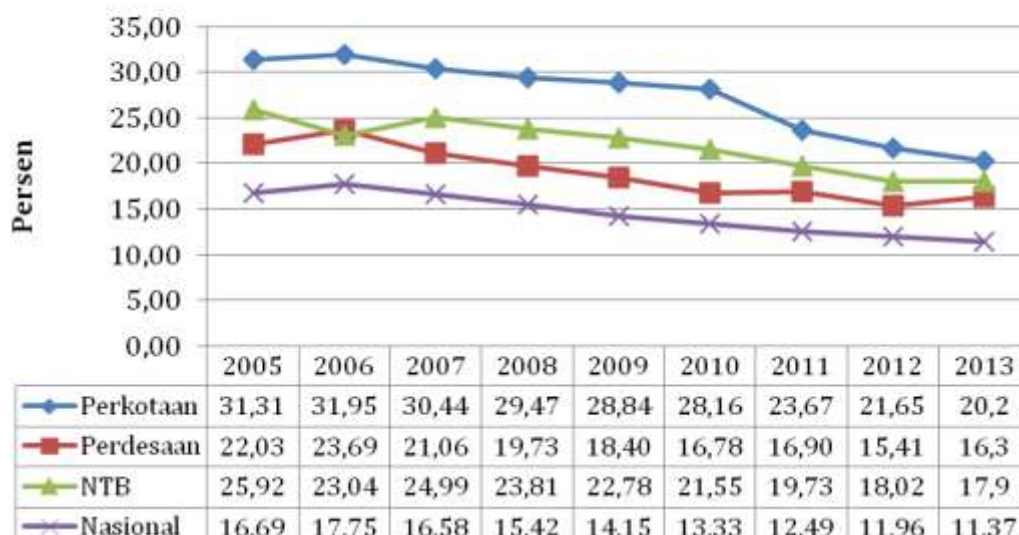


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat berada di atas rata-rata nasional. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung berkurang namun angka kemiskinannya relatif tinggi (Gambar 4). Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mencapai 17,9 persen sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 11,37 persen. Persentase penduduk miskin perkotaan di Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

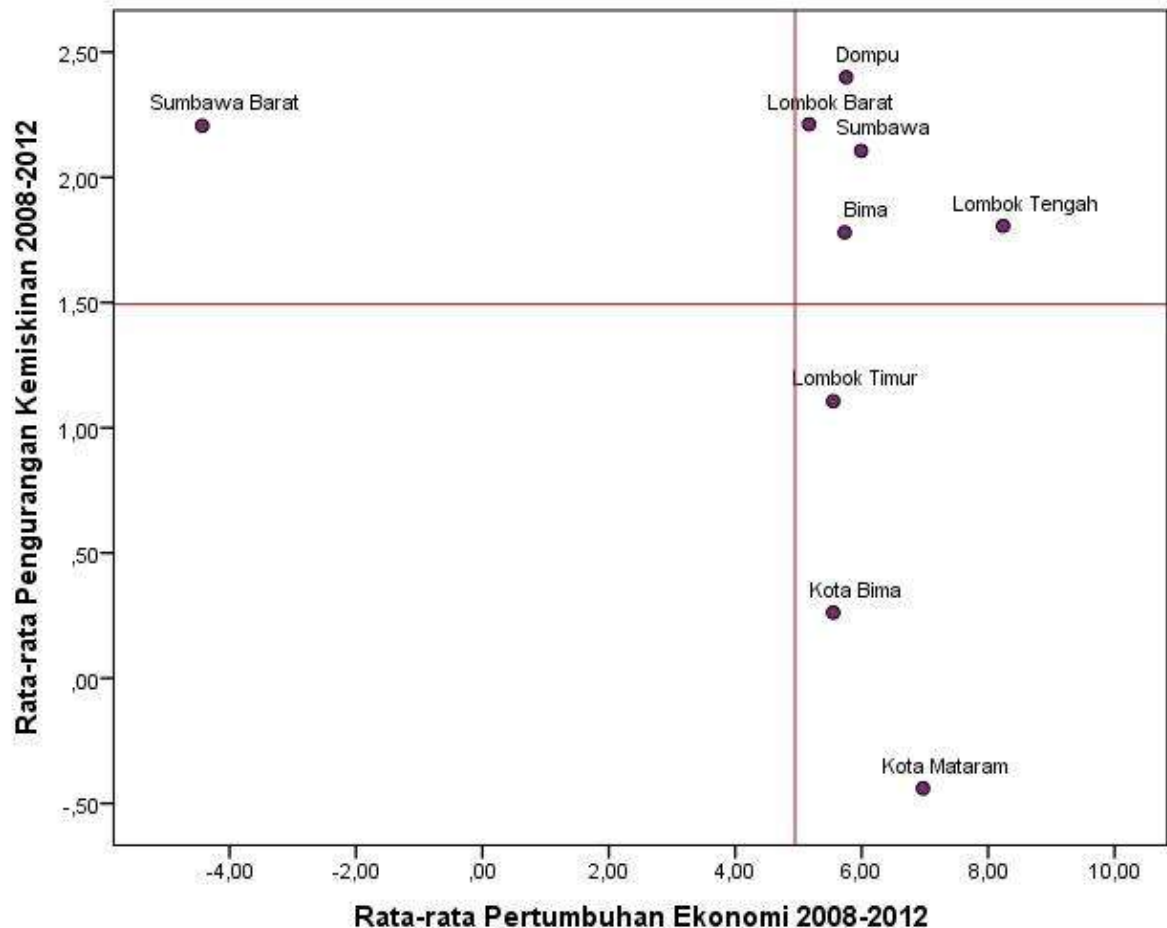
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan Lombok Tengah termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh

pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Sumbawa Barat terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

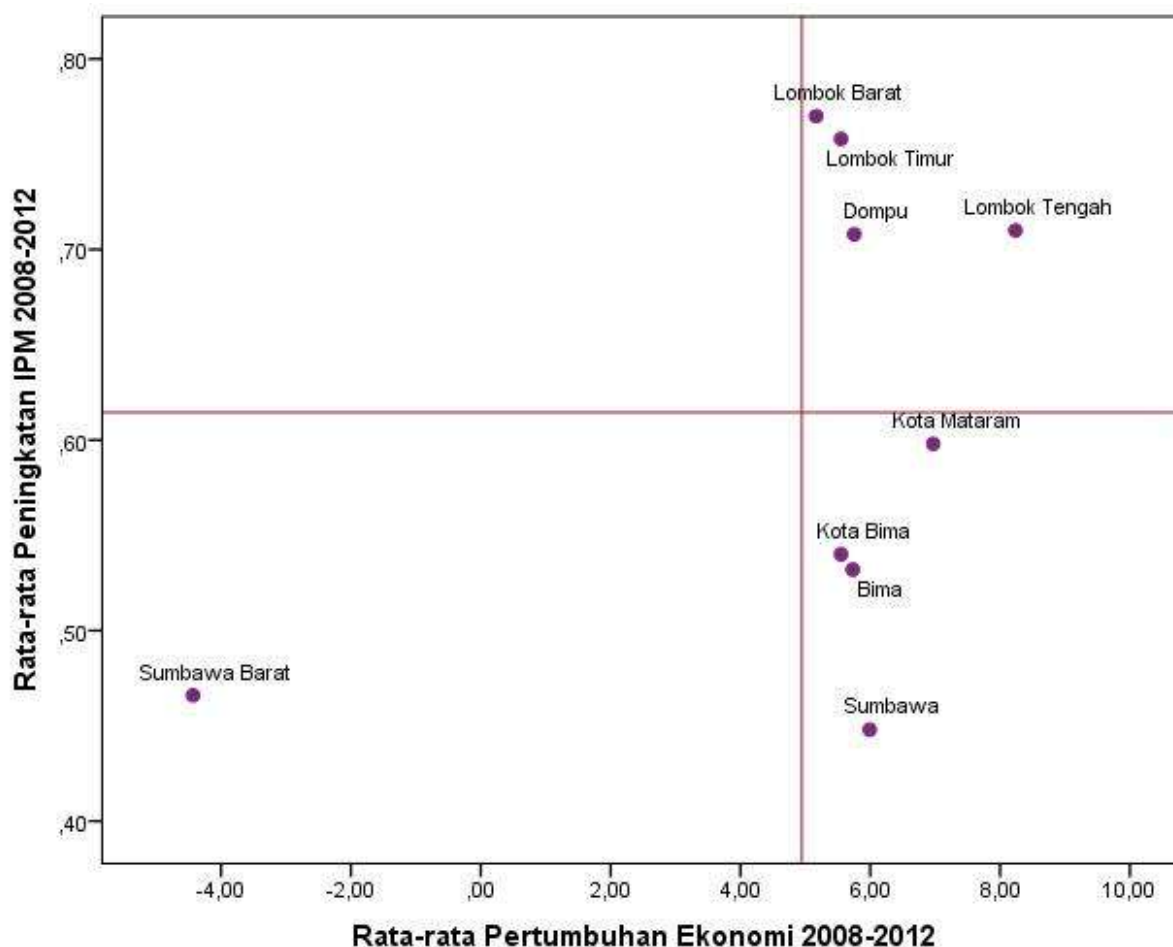
Ketiga, tidak ada kabupaten yang terletak di kuadran III, yaitu memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Keempat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kota Bima terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum

memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Dompu, dan Lombok Timur merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan

dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, tidak ada kabupaten atau kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Ketiga, Kabupaten Sumbawa Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Bima, Sumbawa, Kota Mataram, dan Kota Bima terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

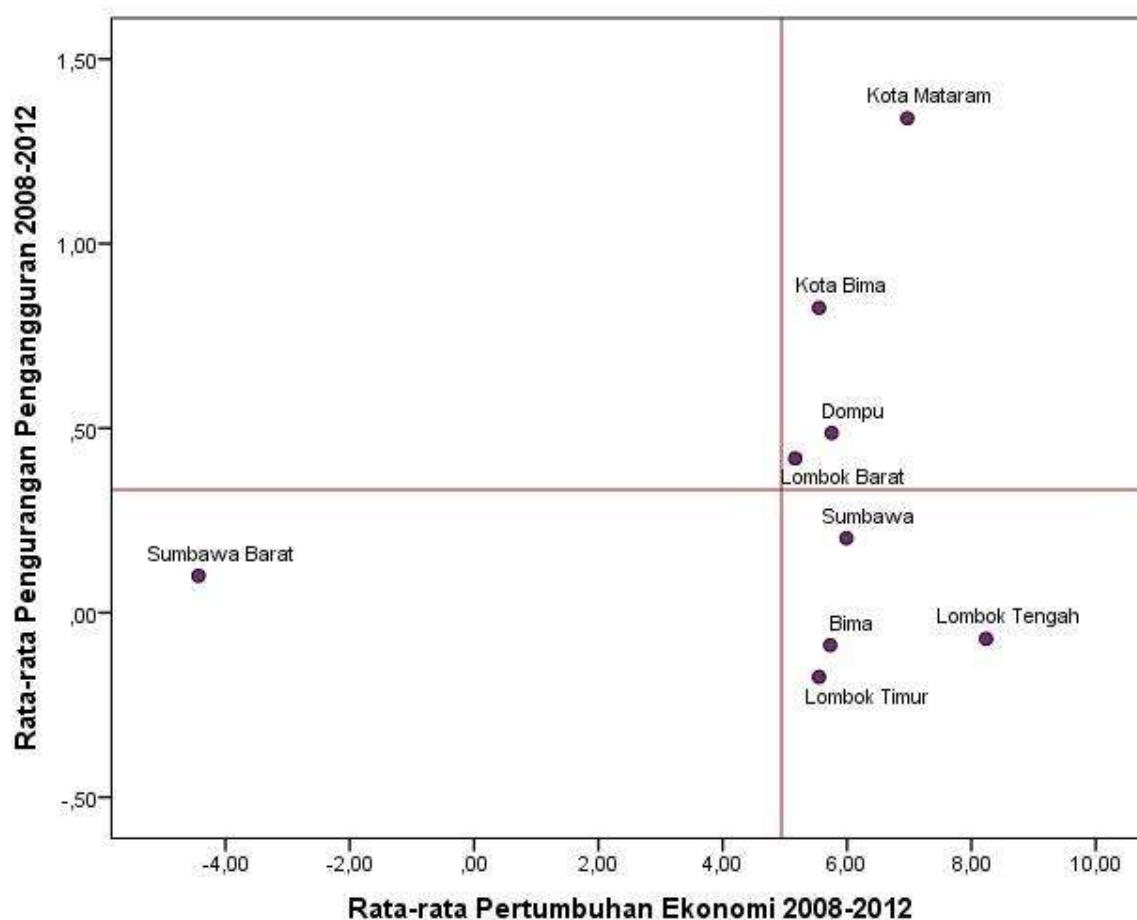
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Lombok Barat, Dompu, Kota Mataram dan Kota Bima termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, tidak ada kabupaten atau kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Ketiga, Kabupaten Sumbawa Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, Lombok Timur dan Lombok Tengah terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012

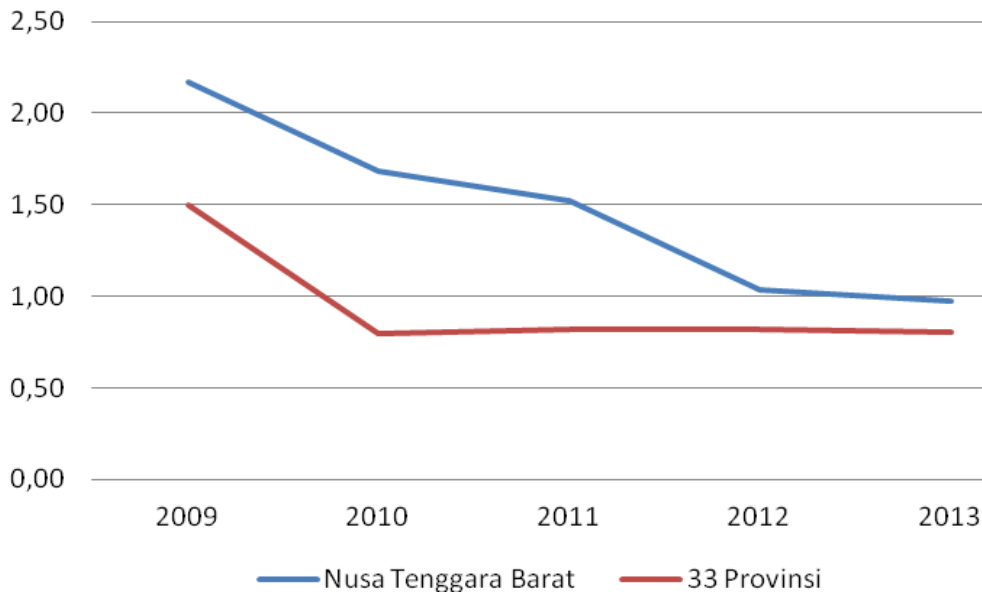


Sumber: BPS, 2012 (diolah)

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat berkategori tinggi, menunjukkan perekonomian di kabupaten/ kota di provinsi ini belum merata. Nilai indeks williamson dari tahun 2009-2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Nusa Tenggara Barat adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan karakteristik kepulauan membutuhkan biaya pembangunan lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi dan energi.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Karakteristik daerah kepulauan mengakibatkan banyak warga yang sukar dicapai oleh sarana dan prasarana sosial ekonomi. Keterbatasan jalan membuat warga sukar untuk saling berhubungan dan memperoleh pelayanan yang seharusnya disediakan pemerintah. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki PDRB perkapita yang tinggi, jauh meninggalkan daerah lain di kepulauan Nusa Tenggara. Kekayaan sumber daya alam Sumbawa Barat turut mendukung tingginya pendapatan perkapita di daerah ini.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lombok Barat	4.844	5.453	6.019	6.558	7.254	7.966
Lombok Tengah	3.625	4.175	4.801	5.393	6.206	7.102
Lombok Timur	3.958	4.475	5.022	5.604	6.324	6.943
Sumbawa	8.509	7.405	8.373	9.508	11.049	12.304
Dompu	6.610	7.277	8.168	9.028	10.560	11.817
Bima	4.838	5.518	6.278	6.971	7.801	8.713
Sumbawa Barat	119.569	100.000	141.307	156.662	111.858	78.681
Lombok Utara	-	-	6.372	7.007	7.757	8.408
Kota Mataram	8.077	9.323	10.461	11.924	13.521	14.629
Kota Bima	5.025	5.618	6.330	6.984	7.822	8.546
NTB	7.697	8.017	9.865	10.987	10.741	10.796

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada sektor pertanian

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada potensi yang dimiliki daerah, untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan prospek di masa mendatang. Struktur perekonomian Nusa Tenggara Barat tahun 2013 didominasi sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan (Tabel 2).

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	26,15	25,38
2.	Pertambangan	17,64	15,46
3.	Industri Pengolahan	3,74	5,19
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,52	0,45
5.	Konstruksi	8,07	8,80
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	16,96	18,21
7.	Angkutan, Telekomunikasi	7,69	9,03
8.	Keuangan	5,87	6,45
9.	Jasa-jasa	13,36	11,03
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Kontribusi sektor industri pengolahan dan utilitas pendukungnya (listrik, gas, dan air minum) besarnya di bawah 5 persen. Dalam analisis sektor basis, sektor pertanian juga memiliki peran yang kuat dalam perekonomian. Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa (Tabel 3). Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), komoditas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, semuanya memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Hal ini menunjukkan Nusa Tenggara Barat memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sub sektor tersebut, sebaliknya kelompok sektor industri pengolahan memiliki nilai $LQ < 1$, yang menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTB untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan tersebut. Provinsi NTB perlu mengembangkan subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,88	1,75	1,72	1,90	2,05
a. Tanaman Bahan Makanan	2,26	2,07	2,05	2,33	2,55
b. Tanaman Perkebunan	1,42	1,33	1,26	1,34	1,40
c. Peternakan	2,15	2,09	2,07	2,24	2,42
d. Kehutanan	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
e. Perikanan	1,59	1,48	1,45	1,54	1,61
2. Pertambangan dan Penggalian	2,73	3,14	3,39	2,70	2,09
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	7,38	8,07	8,49	6,39	4,41
c. Penggalian	2,38	2,43	2,35	2,54	2,71
3. Industri Pengolahan	0,19	0,18	0,18	0,19	0,21
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,50	0,45	0,46	0,52	0,56
a. Listrik	0,58	0,55	0,56	0,61	0,66
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,95	0,91	0,91	1,02	1,12
5. Konstruksi	1,18	1,20	1,18	1,29	1,36
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,86	0,86	0,85	0,91	0,99
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,92	0,93	0,90	0,96	1,05
b. Hotel	0,88	0,84	0,84	0,91	0,96
c. Restoran	0,52	0,48	0,51	0,58	0,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,99	0,85	0,80	0,85	0,89
a. Pengangkutan	1,79	1,66	1,64	1,78	1,90
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	3,11	2,87	2,83	3,07	3,23
3). Angkutan Laut	0,35	0,34	0,34	0,36	0,39
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	3,24	3,01	3,00	3,37	3,69
5). Angkutan Udara	1,37	1,26	1,23	1,39	1,50
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,23	0,22	0,22	0,24	0,26
b. Komunikasi	0,34	0,27	0,26	0,28	0,30
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,56	0,54	0,54	0,60	0,66
a. Bank	0,59	0,58	0,58	0,66	0,73
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,72	0,65	0,66	0,74	0,80
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,78	0,76	0,76	0,84	0,91
e. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
9. Jasa-jasa	1,13	1,08	1,06	1,14	1,18
a. Pemerintahan Umum	2,24	2,16	2,15	2,32	2,48
b. Swasta	0,27	0,25	0,25	0,28	0,30
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,72	0,66	0,66	0,74	0,79
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,12	0,12	0,11	0,12	0,14

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014 sektor perekonomian yang menyerap tenaga kerja signifikan adalah sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa. Peningkatan terbesar pada perubahan jumlah orang yang bekerja Di Nusa Tenggara Barat adalah pada perdagangan dan jasa-jasa (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif. Pengembangan sektor industri pengolahan tetap harus memperhatikan RTRW yang telah ditetapkan sehingga tidak menciptakan alih fungsi lahan pertanian produktif di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	977.723	1.005.690	27.967
2	Pertambangan	42.637	21.704	-20.933
3	Industri Pengolahan	142.934	146.017	3.083
4	Listrik, Gas, Air	4.531	3.407	-1.124
5	Bangunan	76.482	117.809	41.327
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	372.322	470.470	98.148
7	Angkutan & Telekomunikasi	101.516	87.936	-13.580
8	Keuangan	20.784	29.122	8.338
9	Jasa-Jasa	264.852	329.266	64.414
	Total	2.003.781	2.211.421	207.640

Sumber : BPS, 2013

2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTB tahun 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi sebesar 19,81 persen. Investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh

terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah tergantung dari besarnya investasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam memaksimalkan potensi dan peluang investasi.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	55,58	45,93
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,13	16,10
3.	Konsumsi Pemerintah	19,81	12,73
4.	PMTB	29,15	28,92
5.	Perubahan Stok	-3,79	-1,67
6.	Ekspor	21,23	16,10
7.	Impor	23,10	18,12
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Meskipun semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemmentasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

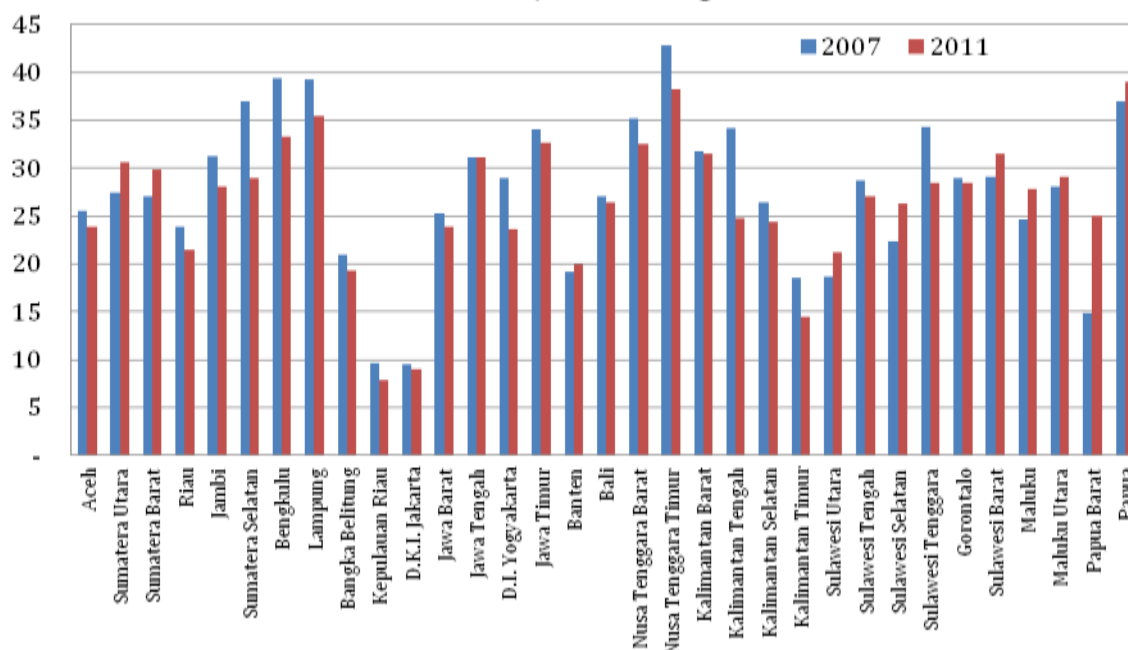
3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat diamati daritingginya persentase pekerja dengan status pekerjaan kurang berkualitas, yakni pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk masuk dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka yang rendah di NTB adalah karena masyarakat bersedia bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup. Pada tahun 2011, persentase pekerjaan kurang berkualitas di NTB sedikit menurun dari tahun 2007, tetapi angkanya masih lebih tinggi dari rata-rata nasional secara nasional (Gambar 9).

Di samping itu, penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008. Hal ini mungkin berkaitan dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa NTB belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan indikator pengangguran yang rendah. Tantangan

yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi juga membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Karakteristik Nusa Tenggara Barat yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut cukup berperan dalam mendukung mobilisasi di wilayah ini. Untuk interkoneksi transportasi darat secara keseluruhan wilayah Nusa Tenggara Barat dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 8.089 km.

Jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di Nusa Tenggara Barat untuk mendukung transportasi darat cukup memadai. Hal ini terlihat dari indikator kepadatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyebrangan untuk mendukung transportasi antar pulau juga masih belum memadai dan kualitasnya relatif masih kurang baik.

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dianalisis dengan membandingkan kondisi antarwilayah, yang didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kepadatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kepadatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah, tingkat kepadatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut

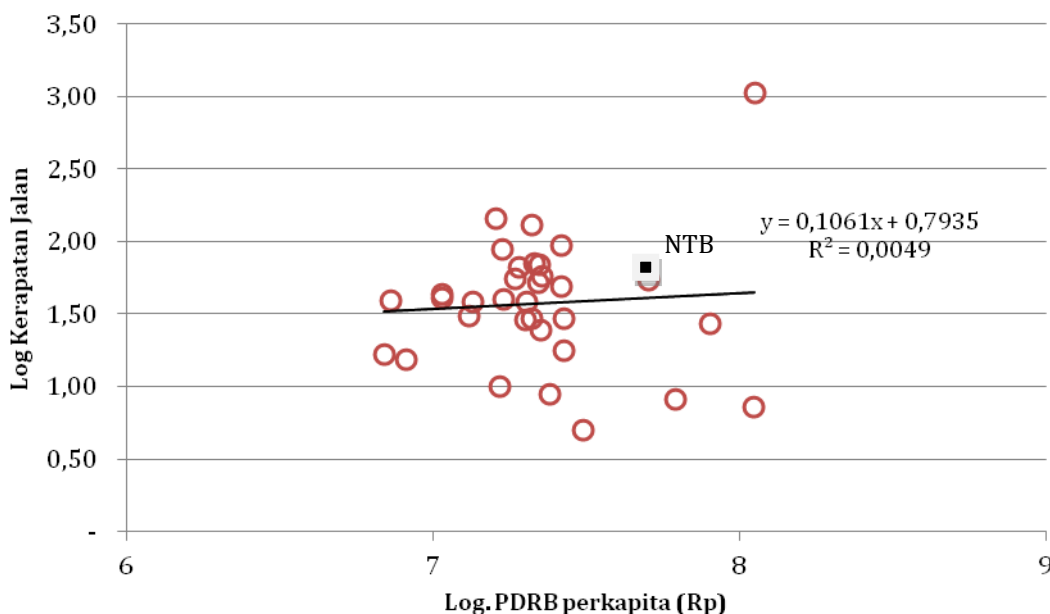
berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Nusa Tenggara Barat relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian panjang jalan bukan merupakan permasalahan utama bagi Nusa Tenggara Barat

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
Indonesia		33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Tabel 7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
NTB	1.498	81	198	11	138	7	9	1	1.843	100
Nusa Tenggara	2.912	81	383	11	268	7	17	1	3.580	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

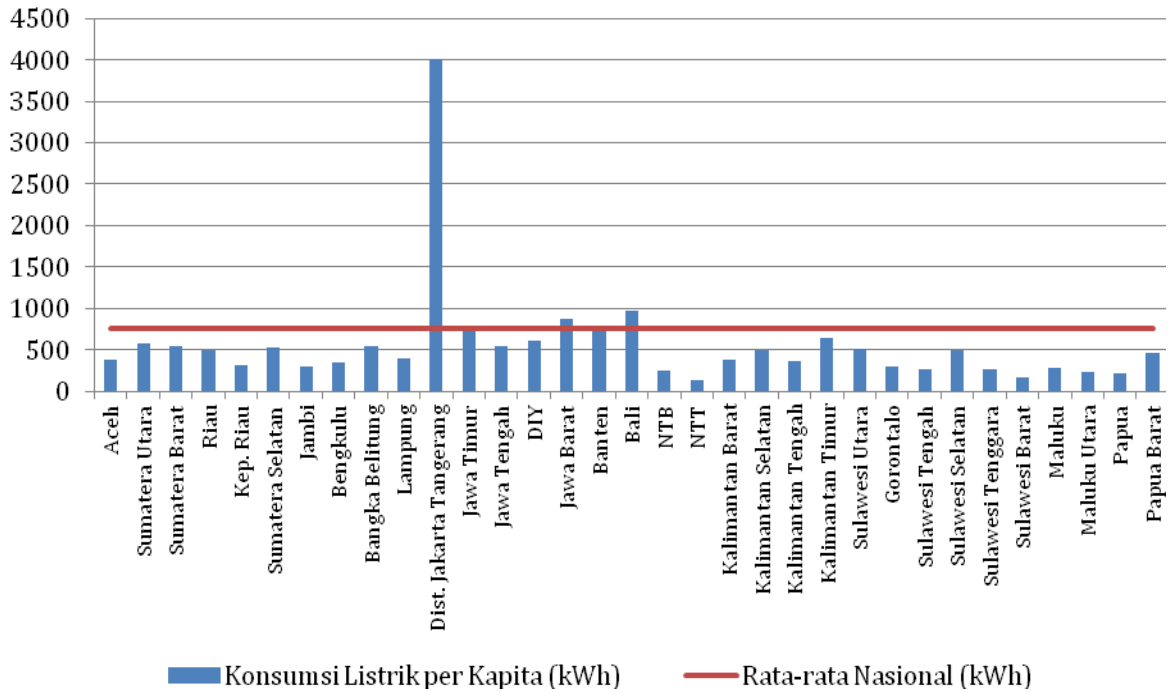
Sumber: BPS, 2012

Secara kualitas, kondisi jalan di Nusa Tenggara Barat relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Maluku sudah mencapai 81 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Nusa Tenggara Barat termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami

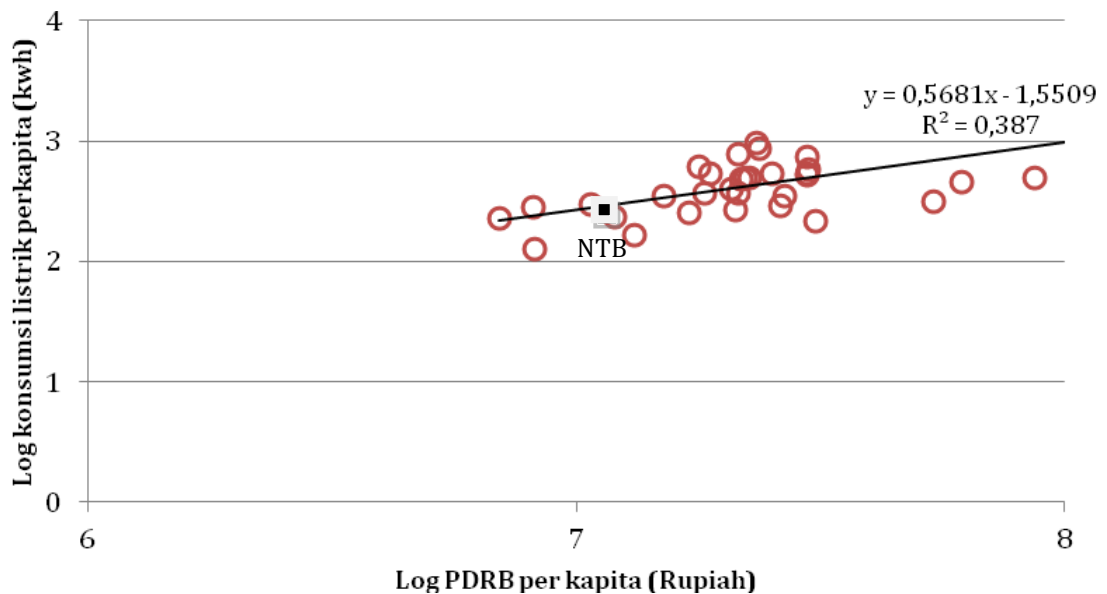
defisiensi infrastruktur listrik. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami defisiensi infrastruktur listrik pada tahun 2013.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

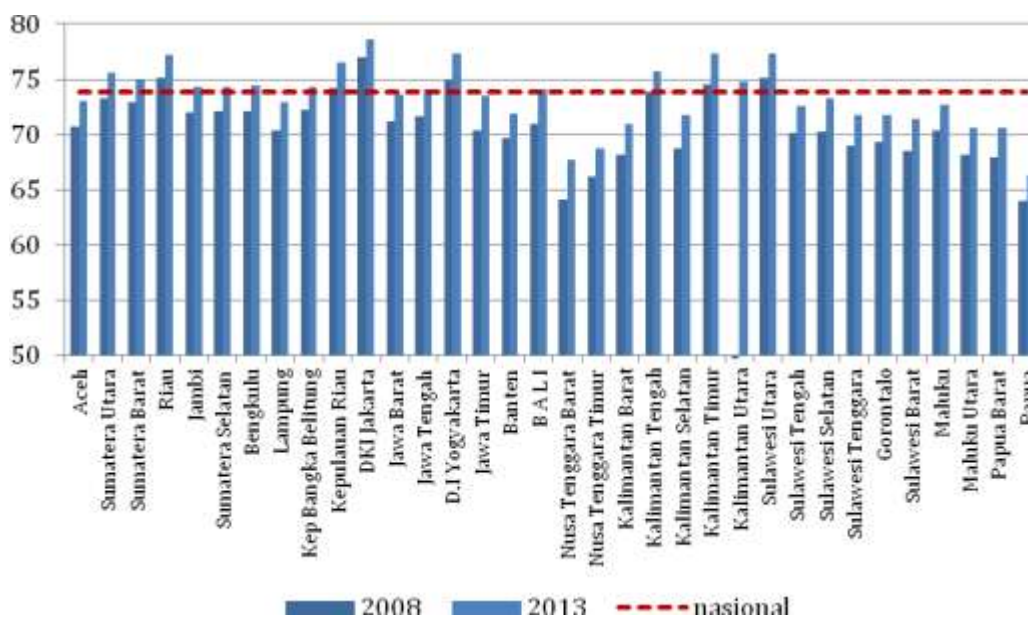


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat ke-33 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 67,73. Nilai IPM ini merupakan terendah kedua setelah Papua. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 61,5 tahun pada tahun 2008 menjadi 63,21 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di NTB meningkat dari 6,7 tahun pada 2008 menjadi 7,2 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di NTB pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 80,13 menjadi 85,19 persen, lebih rendah dari angka nasional sebesar 94,14.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 22,58 persen pada tahun 2008 menjadi 31,90 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	1.234.058	1.228.822	(5.236)
2	SMTp	336.845	361.432	24.587
3	SMTA Umum	353.173	542.603	189.430
5	Diploma I/II/III/Akademi	38.008	34.321	(3.687)
6	Universitas	66.997	168.003	101.006
	Total	2.029.081	2.335.181	306.100

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi NTB ternyata lebih rendah dibanding pinjaman yang diberikan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif (Tabel 9)

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
NTB	14.701	23.346	1,59	
Nusa Tenggara	30.926	39.165	1,27	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

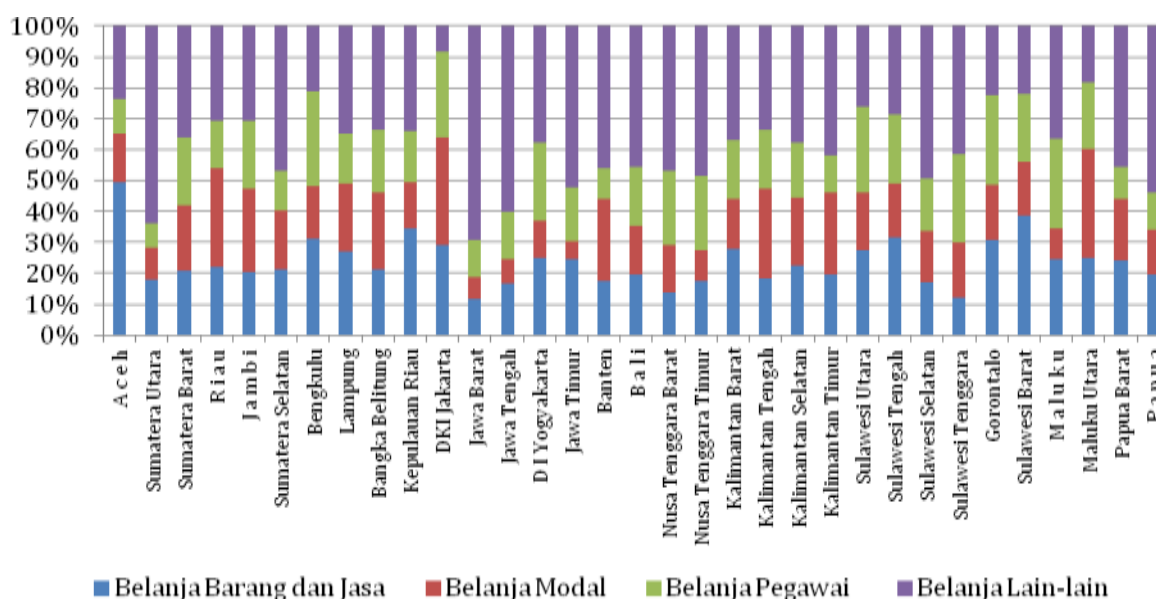
Sumber: BPS, 2013

Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Nusa Tenggara Barat. Rasio belanja modal di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 sebesar 15,06 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 24,28 persen (Gambar 14). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Pertumbuhan daerah Nusa Tenggara Barat memiliki prospek baik, dengan didukung beberapa modal pembangunan yang dimiliki. Dalam konteks ini Provinsi NTB memiliki tiga modal berharga. *Pertama*, posisi geografis NTB yang relatif dekat Bali dan memiliki beberapa obyek wisata yang apabila dikemas dengan baik akan dapat menarik banyak kunjungan wisatawan. Namun hal ini perlu dukungan infrastruktur yang memadai, baik bandara, pelabuhan, jalan raya, serta jadwal penerbangan dan pelayaran yang memadai.

Kedua, struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting

mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang banyak.

Ketiga, NTB memiliki beberapa komoditas unggulan, terutama bahan pangan seperti jagung, sapi, rumput laut, serta barang tambang non migas. Komoditas ini bukan hanya untuk memenuhi konsumsi di dalam provinsi NTB namun juga dapat diekspor ke daerah lain. Dengan keunggulan tersebut, Provinsi NTB dapat mengembangkan komoditas tersebut sebagai ikon dan penggerak perekonomian daerah yang didukung dengan industri pengolahan yang baik untuk memberikan nilai tambah.

Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek NTB dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,7 – 9,0 persen dapat tercapai. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan akan terus meningkat seiring dibukanya beberapa penerbangan langsung internasional. Pengembangan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah, pengerjaan baypass BIL dan Bendungan Rababakka, serta penyelesaian bendungan Pandan Duri akan mendorong pertumbuhan investasi tahun 2015 .
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 16,9 – 12,0 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 17,9 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 5,9 poin persentase atau 0,98 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, baik internal daerah Nusa Tenggara Barat maupun eksternal. Dampak pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas ekspor perikanan, hasil tambang, dan rumput laut.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis di atas dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan daerah yang disaring berdasarkan kriteria: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- e. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- f. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu startegis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida, bibit unggul) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

